

## SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### PENGARUH DBH, DAU, DAN DAK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Yoga Andrianda**

Politeknik Negeri Sriwijaya  
[yogaandrianda02@gmail.com](mailto:yogaandrianda02@gmail.com)

**Adelia Rosada**

Politeknik Negeri Sriwijaya  
[adeliarosada96@gmail.com](mailto:adeliarosada96@gmail.com)

---

#### Abstrak

Mengetahui pengaruh bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap derajat kemandirian daerah menjadi tujuan penelitian ini. Selama lima tahun, dilakukan seleksi secara purposive dari 17 kabupaten dan kota dengan menggunakan data panel. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yang telah meraih DBH, DAU, dan DAK, serta unsur-unsur penyusun persentase kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 hingga 2022, dijadikan sampel penelitian. Informasi tersebut dimuat di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dengan menggunakan software SPSS versi 26, analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan

---

### THE INFLUENCE OF DBH, DAU, AND DAK ON THE LEVEL OF INDEPENDENCE OF SOUTH SUMATRA PROVINCE

#### Abstract

Finding out how profit sharing, special allocation, and general allocation funds affect the degree of regional independence is the goal of this study. For five years, purposeful selection was done from 17 districts and cities using panel data. All of the South Sumatra Province's districts and cities that have achieved DBH, DAU, and DAK, as well as the elements that make the overall provincial monetary autonomy percentage from 2018 to 2022, make up the study sample. The General Directorate of Monetary Balance's official website provided this information. Using the SPSS version 26 software, multiple regression analysis was used to analyze the data in this study.

**Keywords:** Financial Independence, Fiscal Decentralization, Balancing Funds

---

#### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat menerapkan bentuk pemerintahan desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah, yang semula dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, pemerintah daerah tentunya memerlukan sumber daya yang besar. Tujuan kebijakan otonomi

daerah adalah agar pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya, serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik secara mandiri. Selain itu, mereka juga didesak untuk bertumbuh guna mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat (Ikhwan, 2011). Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana untuk perimbangan seringkali didistribusikan berdasarkan komponen belanja daerah dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam memungut pajak daerah (Nurdini, Wiratno, & Farida, 2015). Hal ini sesuai dengan penelitian Kuncoro (2004) yang menunjukkan bahwa hanya 20% belanja daerah yang dapat dibiayai oleh PAD. Dengan demikian, sumber pendapatan utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah adalah dana perimbangan (Sasana, 2010).

Besarnya kekayaan yang dimiliki setiap daerah tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan setiap daerah, klaim Prasetya (2015). Oleh karena itu, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki anggaran yang berbeda. Ketimpangan pendanaan antar pemerintah daerah berkurang dan kegiatan daerah dibiayai dengan bantuan dana perimbangan.

Untuk menyeimbangkan kesenjangan anggaran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemerintah pusat memberikan dana penyesuaian, misalnya dana alokasi umum (DAU), kepada pemerintah daerah (Erdi & Rachmawati, 2015). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah penjatahan anggaran dari APBN kepada daerah yang dialokasikan untuk membantu mendukung kegiatan khas daerah dan sesuai dengan tujuan nasional. Secara khusus, DAK berkontribusi terhadap pendanaan prasarana dan sarana daerah yang meningkatkan pelayanan publik. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit dievaluasi dengan menggunakan teknik alokasi umum atau yang merupakan prioritas nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk membiayai kebutuhan daerah, daerah mendapat dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari keuntungan APBN dengan proporsi tertentu..

Belanja daerah diartikan sebagai setiap penurunan kekayaan bersih daerah yang digunakan untuk memenuhi komitmen daerah dalam jangka waktu anggaran tertentu (UU Nomor 23 Tahun 2014). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Fenomena Flypaper Effect akan muncul apabila belanja daerah menggunakan pembayaran transfer dari pemerintah federal yang sebagian besar merupakan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pembayaran Perimbangan. Dengan kata lain, fenomena Flypaper Effect terjadi ketika pemerintah daerah lebih mengutamakan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa DAU dan DAK dibandingkan kemampuan daerah yang bersumber dari PAD. Respons yang tidak seimbang terhadap fluktuasi jumlah dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dikenal dengan istilah Flypaper Effect. Tresch (2002) menyatakan bahwa dana transfer diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan pemahaman bahwa penerima akan memperoleh keuntungan dari transfer (hibah), yang seringkali mengakibatkan bertambahnya penerima. Dengan kata lain, pemerintah diharapkan dapat membatasi reaksi berlebihan terhadap belanja daerah seminimal mungkin berdasarkan hasil Flypaper Effect terhadap distribusi belanja.

Palembang berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, salah satu dari sepuluh provinsi yang membentuk pulau Sumatera. Luas wilayahnya ±91.592,43 km<sup>2</sup>, dengan garis lintang dan bujur masing-masing 1° sampai 4° Lintang Selatan dan 102° sampai 106° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Selatan mengendalikan dan mengawasi operasional pemerintahannya sendiri dan bebas menangani dan memperluas aliran pendapatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan nasional. Salah satu aspek krusial di Provinsi Sumatera Selatan yang perlu mendapat pengawasan ketat adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian APBD di Provinsi Sumatera Selatan mengikuti pola tertentu, dan anggarannya semakin bertambah.

**Tabel 1. Derajat Kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2018-2022 (Dalam Rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	PAD	Dana Perimbangan	% PAD terhadap Perimbangan
1	2018	3.528.010.712.183	5.577.767.500.414	63,25%
2	2019	3.494.510.853.251	5.765.176.417.581	60,61%
3	2020	3.375.100.984.842	5.875.896.342.538	57,43%
4	2021	3.865.463.033.085	5.712.683.072.712	67,66%
5	2022	4.930.954.855.677	5.090.093.999.526	96,87%

Sumber: BPKAD Prov. Sumsel, Data diolah (2023)

Posisi keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan ditampilkan pada gambar di atas. Data di atas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pendapatan daerah dibandingkan pendapatan Asli Daerah. Di Provinsi Sumatera Selatan, perbandingan PAD dan Dana Perimbangan dari tahun 2018 ke tahun 2021 sebesar 57,43% hingga 67,66%, dan pada tahun 2022 sebesar 96,87%, hampir 100%, menunjukkan bahwa pendapatan Pemerintah Pusat terus melebihi PAD. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan finansialnya untuk mempertahankan pemerintahannya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh fenomena Flypaper Effect. Oleh karena itu, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan otonomi belanja kepada pemerintah daerah.

Andjarwati, Budiarti, Soemadijo, dan Yasin (2021) melakukan penelitian sebelumnya mengenai derajat kemandirian keuangan daerah dan menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, perimbangan keuangan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut studi Musfirati dan Sugiyanto (2021).

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diteliti dalam penelitian terkait (Ufaira, 2020). Berdasarkan temuan studi, Danais tidak memiliki dampak nyata terhadap kemandirian keuangan daerah (KKD), sedangkan DAU dan DAK mempunyai dampak merugikan yang cukup besar. Selain itu, DAK, Danais, dan DAU sekaligus mempengaruhi tingkat KKD. Utari Handayani dan NR melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di DIY Periode 2007-2014)” Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DAK secara signifikan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah (KKD) dibandingkan DAU, dan DAK mempunyai pengaruh yang sangat menguntungkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh yang baik terhadap belanja modal. Namun menurut penelitian Prastiwi & Aji (2020) mengenai pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dana khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pemerintah daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun tahun anggaran 2013–2018), PAD justru meningkatkan kinerja keuangan daerah, sementara dana perimbangan memburuk.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai dampak perimbangan uang terhadap otonomi daerah menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Lebih lanjut, penelitian tersebut dilakukan pada waktu dan lokasi yang berbeda. Metodologi penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun kali ini, penulis memusatkan penyelidikannya pada lokasi tertentu di salah satu pemerintahan provinsi di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan temuan yang lebih tepat mengenai bagaimana dana perimbangan—yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil—berpengaruh terhadap

kemandirian daerah. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan edukasi kepada pemerintah daerah mengenai cara pengelolaan uang perimbangan dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi adalah proses di mana entitas administratif perantara dan lokal menerima sumber daya, wewenang, tanggung jawab, dan kekuasaan dari pemerintah federal. Menurut Ghuman dan Singh (2013), desentralisasi meningkatkan kualitas dengan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan pengawasan terhadap prosedur pengambilan keputusan dan penyampaian layanan publik. Di Indonesia, pemerintah pusat memberikan uang kepada pemerintah daerah melalui alokasi, bagi hasil, dan dana alokasi khusus dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Ketiga dana perimbangan yang bersumber dari dana APBN tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan horizontal kemampuan masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang dapat dipenuhi melalui PAD.

### **Tingkat Kemandirian Daerah**

Menurut Halim (2007:232), besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti pinjaman dan dukungan pemerintah pusat, menunjukkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan dukungan pemerintah daerah dan provinsi setelah ditambah dengan pinjaman untuk mendapatkan Rasio Kemandirian Keuangan.

Tingkat kemandirian suatu daerah menunjukkan betapa bergantungnya daerah tersebut pada sumber daya dari luar; tingkat kemandirian yang lebih rendah berarti bahwa wilayah tersebut lebih bergantung pada dukungan dari luar, khususnya dari pemerintah federal dan lokal. Sebaliknya, semakin besarnya kemandirian menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam pembangunan daerah, khususnya melalui pembayaran PAD. Suatu daerah dianggap mandiri secara finansial jika PAD-nya melebihi pinjaman dan bantuan pemerintah dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal, termasuk DBH, DAU, dan DAK. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengurangi uang perimbangan. Namun, jika PAD daerah lebih kecil dari dana hibah dan pinjaman pemerintah federal, negara bagian, dan daerah, seperti DBH, DAU, dan DAK, maka daerah tersebut dianggap tidak mandiri secara finansial.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil atau DBH dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan proporsi tertentu terhadap pendapatan APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari dana ini adalah untuk menutup kesenjangan keuangan yang ada antara pemerintah pusat dan daerah. Meningkatkan dan menjaga keseimbangan vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah federal merupakan tujuan utama pembagian DBH. Kehutanan, minyak bumi dan gas alam, energi panas bumi, industri pertambangan dan batubara, serta perikanan semuanya ditanggung oleh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Bagi Hasil Pajak. Untuk menunjang belanja daerah, Dana Bagi Hasil Pajak diatur dan didokumentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah sepenuhnya bertanggung jawab mengelola Dana Bagi Hasil, meskipun pemerintah federal tidak mempunyai batasan berapa banyak dana yang boleh dibelanjakan. Dengan pemanfaatan dana bagi hasil sebagai belanja, diyakini pemerintah daerah akan lebih mampu menghasilkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutannya dengan semakin besarnya pembayaran transfer bagi hasil yang diterima pemerintah pusat. Dengan demikian, kemandirian finansial pemerintah daerah akan berkurang (Marizka, 2013). Menurut penelitian Verawaty, Fransisca, dan Rahmawati (2017), dana bagi hasil berdampak buruk terhadap derajat kemandirian daerah.

Berdasarkan konsep dan penemuan penelitian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H1** = Dana Bagi Hasil memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan dan negatif.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan uang yang bersumber dari pendapatan APBN dan disalurkan untuk menunjang kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi dengan menyamakan kemampuan keuangan antar daerah, menurut Nordiawan (2017: 87). Daerah dengan kemampuan lebih besar akan menerima lebih sedikit DAU dari pemerintah pusat, sedangkan daerah dengan kemampuan lebih rendah akan menerima lebih banyak DAU (Sidik, 2004:96). Dengan kata lain, jika pemerintah daerah menerima DAU yang lebih besar dari pemerintah pusat, maka daerah akan kehilangan kemerdekaannya. Hal ini mungkin terjadi karena terbatasnya PAD daerah, yang memaksa pemerintah federal untuk memberikan lebih banyak dana kepada pemerintah daerah. Penelitian Amalia & Haryanto (2019) dan Musfirawati & Sugianto (2021) menunjukkan bahwa DAU berdampak buruk terhadap derajat kemandirian daerah.

Berdasarkan konsep dan penemuan penelitian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H2** = Dana Alokasi Umum memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan dan negatif.

### **Dana Alokasi Khusus**

Keadilan dan pemerataan mendapat prioritas utama baik oleh Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. DAK memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dananya sendiri. Satu-satunya pengecualian adalah DAK hanya dapat digunakan untuk tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun belanja tersebut harus memberikan outcome yang sama dengan Dana Alokasi Umum, yaitu meningkatkan perekonomian daerah, yang pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dana yang diperuntukkan bagi alokasi khusus dimaksudkan untuk menunjang program-program yang dimiliki daerah dan menjadi prioritas nasional (Yani, 2002:166). Dengan kata lain, daerah tersebut masih memiliki pendapatan awal daerah yang rendah dan harus bertransformasi menjadi daerah yang lebih mandiri. Daerah tidak akan bisa mencapai kemandirian anggaran jika pemerintah federal menyediakan DAK yang cukup besar.

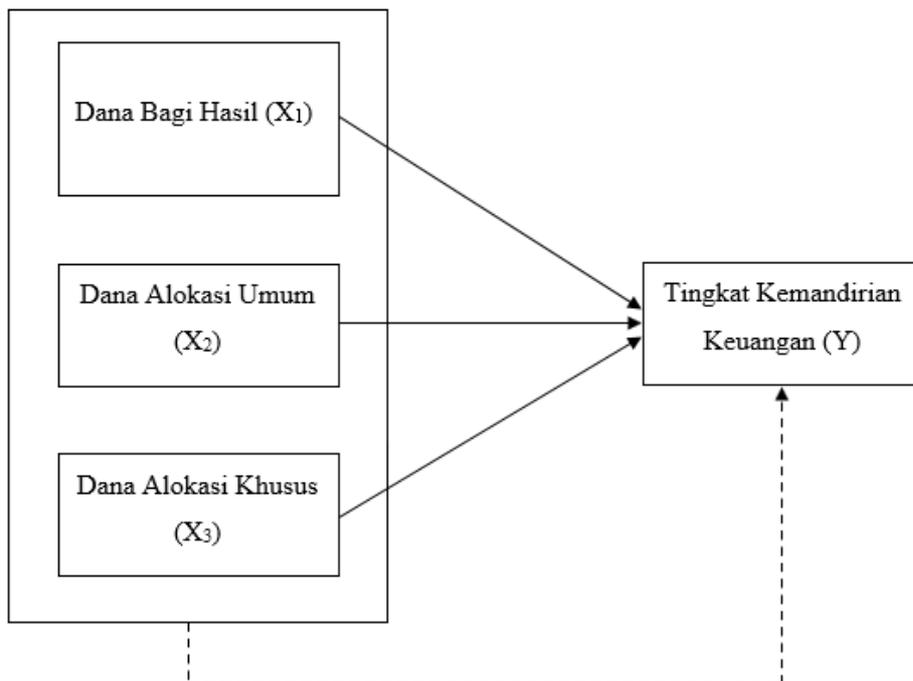
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dana pendapatan APBN yang disebut dana alokasi khusus atau DAK disalurkan kepada daerah tertentu guna membantu pendanaan inisiatif khusus yang menjadi kewenangan pemerintah pemegang kewenangan daerah. Selain itu, sarana dan prasarana penting pelayanan masyarakat yang belum mencapai tingkat tertentu dapat dibangun dengan dana khusus, dan percepatan pembangunan daerah (Harjito, Surya, & Yulianto, 2020). Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara negatif oleh alokasi dana umum, menurut penelitian Musfirawati & Sugianto (2021) dan Amalia & Haryanto (2019). Hal ini berarti kemandirian daerah semakin menurun seiring dengan bertambahnya DAK yang diperoleh daerah. Sebaliknya, derajat kemandirian daerah suatu daerah meningkat seiring dengan menurunnya DAK. Dengan demikian, para ahli menilai dana alokasi khusus (DAK) berdampak pada derajat kemandirian keuangan daerah. Suatu daerah dianggap kurang otonom karena masih bergantung pada keuangan pemerintah pusat jika menerima jumlah DAK dari pemerintah yang lebih besar.

Berdasarkan konsep dan penemuan penelitian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H3** = Dana Alokasi Khusus memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah secara signifikan dan negatif.

### Kerangka Pikir

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dengan mengambil studi teoritis dan empiris dari penelitian sebelumnya, peneliti berupaya untuk menggambarkan tujuan penyelidikan ini dalam kerangka berikut: **Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Yoga Andrianda dan Adelia Rosada)**



**Gambar 1. Kerangka Pikir**  
Sumber: Data primer, diolah peneliti (2023)

## METODE PENELITIAN

Data numerik digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kajian semacam ini didasarkan pada metrik kuantitatif atau kuantitas yang dapat diterapkan pada fenomena yang diamati (Fauzi et al., 2019: 8). Data konkrit, atau data positif, adalah dasar metodologi penelitian. Angka-angka yang dihitung dengan teknik pengujian statistik digunakan sebagai data penelitian untuk membuat kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari banyak sumber. Berdasarkan cara pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder; berdasarkan waktu merupakan gabungan data cross-sectional dan time series; dan karena jenisnya, sistem yang digunakan adalah data kuantitatif. Studi dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Informasi tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang tersedia online di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen setelah pemilihan dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan tujuan dan penekanan penelitian. Persamaan regresi linier digunakan untuk menilai hipotesis model penelitian. Aplikasi pengolahan data SPSS 26 digunakan untuk ini. diantaranya uji autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Uji statistik termasuk koefisien determinasi, uji T, dan uji F dilakukan berulang kali untuk model regresi linier berganda ini. Penelitian ini biasanya menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Derajat kemandirian daerah yang ditentukan dengan membagi PAD dengan pendapatan transfer merupakan variabel dependen dalam penelitian ini (Syamsudin et al., 2015; Berliani, 2016; Harahap et al., 2018). Sedangkan tiga variabel independen dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk menghitung ketiga variabel tersebut berdasarkan nilai realisasinya yang diukur dalam satuan rupiah. Persamaan statistik yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$Y$  = Variabel Kemandirian Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Variabel Dana Bagi Hasil

$X_2$  = Variabel Dana Alokasi Umum

$X_3$  = Variabel Dana Alokasi Khusus

$\varepsilon_i$  = *Error Term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Menganalisis hasil berbagai uji regresi linier adalah proses melakukan pengujian hipotesis. Menurut Perdana (2016), "Penggunaan metode analisis regresi linier berganda memerlukan uji asumsi klasik yang harus dipenuhi secara statistik untuk mengetahui apakah model regresi yang ditentukan merupakan model terbaik, dan cocok dijadikan sebagai acuan pengetahuan atau solusi pemecahan masalah praktis". Uji asumsi standar antara lain normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi harus dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis.

### Uji Normalitas

Untuk variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp signifikan Sig (2-tailed) lebih dari nilai  $\alpha = 0,05$  atau 5%, tepatnya dengan nilai  $0,200 > 0,05$ . Dari nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa data kelima variabel penelitian mempunyai distribusi normal

dan layak digunakan dalam analisis regresi. Tabel 2 di bawah ini menampilkan temuan uji normalitas SPSS 26:

**Tabel 2. Normalitas Test**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0002082
	Std. Deviation	89450614797,27478000
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,050
	Negative	-,080
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Temuan uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi variabel DBH, DAU, dan DAK mempunyai nilai signifikansi  $> 0,05$ . Tabel 3 di bawah ini menampilkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.

**Tabel 3. Heteroskedastisitas Test**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	DBH	.957
	DAU	.741
	DAK	.747
a. Dependent Variable: TKKD		

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

### Uji Autokorelasi

Uji Durbin Watson digunakan untuk melakukan uji autokorelasi guna memastikan terjadi autokorelasi atau tidak. Durbin Watson (d) adalah 2,156 dalam penelitian ini berdasarkan temuan uji autokorelasi. Terdapat tiga variabel independen (k) dan 85 titik data (n) dalam penelitian ini. Tabel DW memiliki ambang signifikansi sebesar 0,05. Data pada tabel DW menunjukkan  $dL = 1,5254$ ,  $dU = 1,7736$ , dan  $4-dU = 2,2264$ . Penerapan kriteria pengambilan keputusan  $dU < D < 4 - dU$  pada penelitian ini akan diperoleh hasil sebesar  $1,7736 < 2,156 < 2,2264$  yang merupakan ambang batas untuk menentukan tidak terjadi autokorelasi dalam suatu penelitian. Dari temuan ini jelas bahwa tidak ada autokorelasi dalam penyelidikan ini. Tabel 4 di bawah ini menampilkan temuan uji autokorelasi menggunakan SPSS 26:

**Tabel 4. Autokorelasi Test**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,994 <sup>a</sup>	,988	,988	92237904353,278	2,156

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK  
 b. Dependent Variable: TKKD

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

**Uji Multikolinieritas**

Karena suatu model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat multikolinieritas, maka uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dari nilai pada tabel sudah jelas bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada seluruh variabel independen karena nilai *Variance Inflation Factors* (VIF)-nya berada di bawah 10 atau (<10) dan angka toleransinya lebih dari 0,05 atau (>0,05). Dinyatakan bahwa penelitian dan temuan pengujian dapat dipercaya atau diandalkan. Tabel 5 di bawah ini menampilkan hasil uji multikolinieritas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.

**Tabel 5. Multikolinieritas Test**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	41211053608,280	22887862857,990		1,801	,076		
	DBH (X <sub>1</sub> )	1,045	,159	,187	6,572	,000	,184	5,438
	DAU(X <sub>2</sub> )	,394	1,931	,006	,204	,839	,181	5,523
	DAK(X <sub>3</sub> )	1,033	,027	,694	38,678	,000	,461	2,170

a. Dependent Variable: TKKD

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

**Uji Regresi Linier Berganda**

Menemukan hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas dan variabel terikat merupakan tujuan dari analisis regresi linier berganda. Tabel 6 di bawah ini menampilkan hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 26.

**Tabel 6. Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41211053608,280	22887862857,990		1,801	,076
	DBH(X <sub>1</sub> )	1,045	,159	-,187	6,572	,000
	DAU (X <sub>2</sub> )	,394	1,931	,006	,204	,839
	DAK(X <sub>3</sub> )	1,033	,027	-,694	38,678	,000

a. Dependent Variable: TKKD

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

Koefisien regresi masing-masing variabel independen akan digunakan untuk membangun persamaan regresi linier berganda. Persamaan model regresi linier berganda yang diperoleh dari Tabel 6 adalah sebagai berikut:

$$Y = 41211053608,280 - 0,187 X_1 + 0,006 X_2 - 0,694 X_3$$

**Uji Parsial (t-test)**

Uji parsial (t) digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi masing-masing thitung dicatat dalam analisis ini, kemudian thitung dan ttabel tersebut dibandingkan. Hasil uji parsial dengan ambang signifikansi  $\alpha = 0,05$  atau 5% ditampilkan pada Tabel 7 di bawah ini dengan menggunakan SPSS 26.

**Tabel 7. Uji Parsial (t-test)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41211053608,280	22887862857,990		1,801	,076
	DBH(X <sub>1</sub> )	1,045	,159	-,187	6,572	,000
	DAU (X <sub>2</sub> )	,394	1,931	,006	,204	,839
	DAK(X <sub>3</sub> )	1,033	,027	-,694	38,678	,000

b. Dependent Variable: TKKD

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

Koefisien regresi variabel DBH dan DAK masing-masing sebesar -0,187 dan -0,694 dan keduanya mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu, dapat dikatakan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus mempunyai dampak negatif dan cukup besar terhadap derajat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kata lain, hal ini membuktikan asumsi pertama dan ketiga penulis yang didukung oleh bukti. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,839—nilai yang lebih besar dari 0,05—variabel Dana Alokasi Umum tidak berkorelasi signifikan dengan derajat kemandirian keuangan daerah pada suatu kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### Uji Simultan (F-test)

Untuk memastikan apakah seluruh faktor independen secara bersamaan atau simultan mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilakukan uji simultan (f). Tabel 8 di bawah ini menampilkan hasil pengujian simultan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 26:

**Tabel 8. Uji Simultan (F-test)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	567387564880954	5	11347751297619	1333,801	,000 <sup>b</sup>
		45000000000,000		090000000000,000		
	Residual	672118648959276	79	85078309994845		
		700000000,000		15000000,000		
	Total	574108751370547	84			
		20000000000,000				

a. Dependent Variable: TKKD

b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

Selain itu, variabel DBH, DAU, dan DAK mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk uji simultan (uji F), yaitu kurang dari  $\alpha = 0,05$  atau ( $0,00 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan diterimanya hipotesis keempat penulis. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil semuanya mempunyai dampak terhadap variabel Tingkat Kemandirian Daerah.

### Koefisien Determinasi

Dalam regresi linier, koefisien determinasi digunakan untuk menghitung kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, atau seberapa baik variabel tersebut dapat menjelaskan variabel dependen. Tabel 9 di bawah ini menampilkan hasil pengujian koefisien determinasi:

**Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,994 <sup>a</sup>	,988	,985	92237904353,278

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, DAK

c. Dependent Variable: TKKD

Sumber : Data diolah dari SPSS 26 (2023)

Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada tabel yang diperoleh dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 26.00 for Windows menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan (berkontribusi) terhadap variabel dependen. Hal ini menghasilkan nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,985, sebagaimana tergambar dari nilai *Adjusted R square*. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemampuan menjelaskan (kontribusi) Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar 98,5%, kemudian sisanya tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**

Temuan studi ini menunjukkan bahwa program bagi hasil mempunyai dampak besar terhadap kemandirian perekonomian daerah secara finansial. Dengan koefisien DBH sebesar -0,187, jelas bahwa dana bagi hasil berdampak negatif terhadap kemandirian daerah; semakin banyak dana bagi hasil yang dikirimkan pemerintah pusat, maka semakin tidak mandiri daerah secara finansial. Di sisi lain, kemandirian keuangan daerah akan lebih baik jika transfer dana lebih sedikit. Karena setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi Dana Bagi Hasil yang berbeda-beda, maka ada dugaan bahwa dana tersebut berdampak negatif terhadap kemandirian keuangan kabupaten dan kota tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat tentang Dana Bagi Hasil juga memengaruhi realisasinya. Karena dana bagi hasil bergantung pada kemampuan daerah untuk menghasilkan sumber pendapatan yang signifikan, maka peranannya sangat penting ketika menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari perimbangan keuangan. Dana bagi hasil ialah salah satu sumber modal penting, selain dana alokasi umum dan khusus, yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk mengamankan dana pembangunan dan membiayai belanja daerah yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, agar pemerintah daerah dapat menerima transfer uang bagi hasil dalam jumlah besar, maka pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya alam dan potensi pajaknya secara maksimal. Hanya dengan begitu, dana bagi hasil bisa berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian, distribusi penerimaan pajak maupun bukan pajak tahunan pusat ke setiap kabupaten dan kota di Sumsel menurun. Selain itu, setiap daerah menerima jumlah sumber daya alam yang berbeda-beda; ada yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas, ada pula yang mempunyai sumber daya alam yang cukup besar. Akibatnya, pendapatan daerah secara keseluruhan masih bisa diabaikan. Sistem dana bagi hasil yang bersumber dari pajak juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah penduduk, geografi, dan kemampuan masyarakat, namun peran pajak dalam mengumpulkan pendapatan daerah sangat kecil. Mengenai penyaluran DBH, daerah penerima DBH mengeluhkan keterlambatan pembayaran triwulanan. Bahkan setelah pembayaran dilakukan, mungkin masih ada masalah dengan daerah yang dibayar lebih atau kurang. Ini karena pembagian definitif didasarkan pada penerimaan pajak aktual, sedangkan alokasi awal didasarkan pada perkiraan penerimaan pajak, yang mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Selain itu, terjadi keterlambatan triwulanan pembagian DBH yang diperoleh dari sumber daya alam sehingga mengganggu kerangka perencanaan pembangunan daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**

Menurut penelitian, derajat kemandirian daerah Sumsel tidak dipengaruhi oleh dana alokasi umum. Kegagalan daerah dalam menggunakan dana alokasi umum yang disediakan oleh pemerintah pusat dengan cara yang tepat dan efektif menunjukkan bahwa maksud dan tujuan masyarakat belum tercapai. Selain itu, tidak ada output yang optimal dan efisien yang dihasilkan dengan penggunaan uang tersebut. Hal ini terjadi akibat sebagian besar pemerintah daerah membiayai gaji pegawainya dari DAK. Pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut untuk menjembatani kesenjangan anggaran mereka—yaitu kesenjangan antara uang tunai yang tersedia dan kebutuhan mendasar mereka, termasuk gaji pegawai. Pembayaran gaji pegawai yang biasa disebut belanja pegawai, didefinisikan sebagai dana publik yang dialokasikan kepada anggota staf sebagai imbalan atas kinerja mereka, dengan tujuan untuk menghindari terciptanya aset atau investasi jangka panjang bagi Pemda. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian

dengan lebih cepat dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mendapatkan dana alokasi umum dari pemerintah, namun dana tersebut lebih besar digunakan untuk kegiatan konsumtif dan spekulatif dibandingkan untuk industri produktif yang berpotensi meningkatkan PDB daerah secara signifikan. Dengan demikian, dana alokasi umum tidak banyak berpengaruh terhadap derajat kemandirian daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**

Tingkat kemandirian daerah di Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan temuan penelitian, dipengaruhi secara signifikan oleh DAK. Dana Alokasi Khusus mempunyai dampak negatif terhadap derajat kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan koefisien DAK sebesar -0,694. Dengan kata lain, derajat kemandirian suatu daerah semakin menurun seiring dengan semakin banyaknya dana alokasi khusus yang ditransfer dari pemerintah, dan derajat kemandirian daerah semakin meningkat seiring dengan berkurangnya jumlah dana alokasi khusus yang dikirimkan dari pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga, bahwa Dana Alokasi Khusus mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, terbukti tepat. Daerah-daerah tertentu menerima dana khusus untuk mendukung inisiatif khusus yang termasuk dalam program prioritas nasional yang diawasi oleh mereka. Selain itu, pendanaan tambahan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, kelautan pendidikan, lingkungan hidup serta pemerintahan daerah. DAK ditransfer ke rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara. Perhitungan alokasi dana alokasi khusus dilakukan dalam dua tahap. Daerah mana yang akan menerima dana alokasi khusus diputuskan terlebih dahulu, kemudian diputuskan jumlah dana yang akan diberikan kepada setiap daerah.

### **SIMPULAN**

Hipotesis diuji dalam penelitian ini, dan temuannya menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap derajat kemandirian daerah di sejumlah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan. Temuan-temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil berdampak terhadap derajat kemandirian daerah di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Dana Alokasi Umum tidak berdampak terhadap derajat kemandirian daerah di sejumlah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan;
3. Dana Alokasi Khusus berdampak terhadap derajat kemandirian keuangan daerah di sejumlah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap derajat Kemandirian Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 105–113. <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>].
- Fauzi, F., Basyith Dencik, A., & Isnaini Asiati, D. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Salemba Empat.

- Febriantoko, J., & Mayasari, R. (2018). 7 Years of Establishment of Pagaralam as a Tourism City: How is the Tourism Sector's Ability to Increase Original Local Government Revenue? *International Journal of Scientific Engineering and Science*, 2(9), 61–64. <http://ijses.com/>
- Febriayanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah AKuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Handayani, T. U., & Erinoss. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Hasan, P. P. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(2), 20–40.
- Indonesia (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Menteri Keuangan
- Indonesia (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Menteri Dalam Negeri
- Indonesia (2022). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta : Menteri Keuangan
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2006-2021. *Jurnal Economia*, 2(1), 174–185.
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 9226–9234.
- Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 5(1), 14–31.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–15. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796>
- Masnila, N., Mayasari, R., Firmansyah, F., Febriantoko, J., & Said, J. (2021). The Effect of Good Government Governance on the Financial Reports Quality: The Case of Provincial Capital Governments in Indonesia. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), 270–287. <https://doi.org/10.47747/ijbme.v2i4.385>
- Mayasari, R., & Febriantoko, J. (2018). See More: Evaluation of Work Programs and Financial Performance of Local Government in Indonesia Through Cipp Model. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 9(12), 21169–21178. <https://doi.org/10.15520/ijcrr.v9i12.630>

- Mayasari, R. (2021). *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya*. Palembang: Deepublish Press.
- Mayasari, R., & Febriantoko, J. (2021). Proyek Hasil Penyelenggaraan Daerah Melalui Indikator Kinerja Pada Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 7(1), 1–13. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Africano, F., & Loressa, M. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Belanja Langsung Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 180–189. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Mayasari, R. (2022). Lemahnya Signifikansi Sistem Pengendalian Internal untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 113–122. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.011>
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Nordiwana, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhasanah, S. (2016). *Praktikum Statistika 2: Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>
- Oktavia, C. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–20.
- Perdana K, E. (2016). *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. (1st ed.). Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe UBB.
- Prasetyo, A., & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 872–881. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796>
- Sarif, M. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Survey pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*, 5(5), 38–48.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.